



Utilizing Electronic Journals to Strengthen Evidence-Based State Public Policy Formulation Processes

Pemanfaatan Jurnal Elektronik untuk Memperkuat Proses Perumusan Kebijakan Publik Negara Berbasis Bukti

Veronika Nadia Andriyani

Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Veronika Nadia Andriyani

✉ na2cteabz@yahoo.com

History:

Submitted: 08-07-2026

Revised: 08-08-2026

Accepted: 29-08-2026

Keyword:

Evidence-Based Policymaking, Knowledge Management, Electronic Journals, Regional Innovation, Predatory Publishing.

Kata Kunci:

Kebijakan Berbasis Bukti, Manajemen Pengetahuan, Jurnal Elektronik, Inovasi Daerah, Penerbitan Predator.

Abstract

Contemporary global crises demand knowledge-based public governance over traditional rigid bureaucracy. However, Indonesian local governments encounter structural fragmentation when operationalizing evidence-based policymaking, creating a severe knowledge management vacuum. Existing literature constantly neglects the autonomous role of subnational electronic journals in resolving this critical issue. This qualitative study thoroughly investigates how Open Journal Systems resolve these specific barriers. Results indicate this platform transforms isolated administrative documents into fully validated evidence while shielding public servants from predatory publishing. Crucially, this research introduces a novel conceptualization of local e-journals not merely as passive administrative repositories, but as socio-technical boundary objects and active knowledge brokers. This mechanism uniquely enforces epistemic accountability, actively dismantles manipulative policy-based evidence making through radical transparency, and orchestrates evidence-driven open innovation within fundamentally closed local bureaucracies. Ultimately, this provides a highly replicable institutional design that powerfully elevates grassroots insights into global sustainable development discourses and advances modern artificial intelligence governance systems.

Abstrak

Krisis global kontemporer menuntut tata kelola publik berbasis pengetahuan dibandingkan birokrasi tradisional kaku. Namun, pemerintah daerah Indonesia menghadapi fragmentasi struktural saat mengoperasionalkan kebijakan berbasis bukti, menciptakan kekosongan manajemen pengetahuan parah. Literatur yang ada selalu mengabaikan peran otonom jurnal elektronik subnasional dalam menyelesaikan masalah kritis tersebut. Penelitian kualitatif ini menyelidiki bagaimana Open Journal Systems mengatasi berbagai hambatan spesifik tersebut. Hasil analisis membuktikan platform ini mengubah dokumen administratif terisolasi menjadi bukti tervalidasi penuh sembari melindungi aparatur sipil dari publikasi predator. Secara krusial, penelitian ini memperkenalkan konseptualisasi baru e-jurnal daerah bukan sekadar repositori pasif, melainkan sebagai objek tapal batas sosio-teknis dan pialang pengetahuan aktif. Mekanisme ini menegakkan akuntabilitas epistemik, membongkar manipulasi pembuatan bukti berbasis kebijakan melalui transparansi radikal, serta mengorkestrasi inovasi terbuka dalam lingkungan birokrasi yang tertutup. Pada akhirnya, kajian ini memberikan desain institusional replikatif guna mengangkat wawasan akar rumput ke dalam diskursus pembangunan berkelanjutan global serta memajukan sistem tata kelola kecerdasan artifisial modern.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/jspp.v2i1.445>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika keilmuan, disrupsi teknologi informasi, dan eskalasi krisis global pada era kontemporer mengonstruksikan urgensi bagi negara untuk melakukan redefinisi terhadap fondasi sistem tata kelola pemerintahan. Paradigma administrasi publik konvensional yang dikarakterisasi oleh struktur hierarkis kaku serta orientasi linier pada kepatuhan prosedur hukum formal dinilai tidak lagi memadai untuk memitigasi persoalan publik multidimensi yang bersifat kompleks (*wicked problems*). Fenomena ini mencakup berbagai urgensi global seperti adaptasi perubahan iklim, ketimpangan struktural ekonomi, dan tata kelola kesehatan masyarakat.¹ Sebagai respons rasional terhadap tekanan eksternal dan internal tersebut, terjadi pergeseran tata kelola fundamental menuju implementasi organisasi publik berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*). Dalam paradigma ini, data, informasi empiris, dan pengetahuan ilmiah tidak lagi diposisikan sebagai instrumen komplementer, melainkan diintegrasikan sebagai fondasi utama dalam arsitektur pengambilan keputusan strategis negara.² Transformasi tersebut mengimplikasikan urgensi transisi komprehensif menuju sektor publik yang digerakkan oleh data (*data-driven public sector*). Tata kelola pemerintahan modern dituntut untuk memodifikasi perannya; tidak sekadar melakukan kompilasi informasi secara administratif-pasif, melainkan mengelola, mensintesis, dan mendiseminasikan pengetahuan empiris secara aktif. Proses ini diposisikan sebagai basis formulasional kebijakan yang rasional, efisien, dan responsif terhadap dinamika sosial.³

Dalam diskursus kontemporer ilmu kebijakan publik, artikulasi tata kelola pemerintahan berbasis pengetahuan tersebut termaterialisasi secara substantif dalam konsep Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policymaking* atau EBPM). Konsep EBPM yang pada awalnya diadopsi dari gerakan *evidence-based medicine* pada dekade 1990-an dan diakselerasi oleh administrasi pemerintahan Inggris Raya berakar pada premis bahwa keputusan politik serta instrumen alokasi sumber daya negara akan

¹ Aarthi Raghavan, Serik Orazgaliyev, and Mehmet Akif Demircioglu, "Public Sector Innovation and Wicked Problems in Asia: From Reactive to Proactive Governance," *International Journal of Innovation Studies*, December 2025, 100172, <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2025.12.003>.

² Iván Claudio Suazo-Galdames, Mahia Saracostti, and Alain Manuel Chaple-Gil, "Scientific Evidence and Public Policy: A Systematic Review of Barriers and Enablers for Evidence-Informed Decision-Making," *Frontiers in Communication* 10 (July 30, 2025), <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305>.

³ Md Altab Hossin et al., "Big Data-Driven Public Policy Decisions: Transformation Toward Smart Governance," *Sage Open* 13, no. 4 (October 12, 2023), <https://doi.org/10.1177/21582440231215123>.

menghasilkan luaran (*outcomes*) yang optimal apabila diformulasikan berdasarkan bukti empiris yang dikurasi secara ketat.⁴ Pendekatan ini memposisikan diri sebagai antitesis terhadap formulasi kebijakan yang bertumpu pada intuisi, data anekdot, konvensi birokrasi tradisional, atau preferensi ideologis subjektif elite politik. Di Indonesia, komitmen yuridis dan teknokratis terhadap implementasi EBPM diinstitusikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Regulasi tersebut mengamanatkan secara imperatif bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi sebagai landasan esensial dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional untuk mengeskalasi kemandirian serta daya saing domestik pada tingkat global.⁵ Mandat regulatif tersebut dioperasionalkan secara presisi pada tingkat subnasional melalui Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) sebagai cetak biru pembangunan berbasis riset. Implementasi dan koordinasi dari kebijakan tersebut didelegasikan kepada instansi penunjang urusan pemerintahan baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).⁶

Namun demikian, pada tataran empiris, terdapat inkonsistensi norma, inefisiensi institusional, serta kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang kritis pada tingkat operasional. Mayoritas pemerintah daerah, termasuk entitas BRIDA pada yurisdiksi subnasional (seperti Kabupaten Jember), telah memproduksi luaran riset, naskah akademik, dan dokumen evaluasi kebijakan dalam volume yang signifikan melalui kontribusi Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat fungsional, serta akademisi lokal. Kendati demikian, otoritas lokal pada umumnya belum memiliki infrastruktur diseminasi dan kurasi ilmiah elektronik yang terintegrasi. Keterbatasan tersebut mengondisikan terjadinya kekosongan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management vacuum*). Implikasinya, hasil kajian mengalami reduksi menjadi sekadar dokumen administratif pasif yang tersimpan pada internal birokrasi tanpa melalui proses penelaahan sejawat

⁴ Mike D Schneider et al., "Revisiting the Base in Evidence-Based Policy," *Political Studies* 74, no. 1 (February 12, 2026): 210–28, <https://doi.org/10.1177/00323217251320728>.

⁵ Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no->.

⁶ Indonesia, "Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah," 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/267972/peraturan-brin-no-5-tahun-2023>.

(*peer-review*), sehingga tidak dapat diakses oleh perumus kebijakan strategis maupun publik.

Lebih lanjut, ketiadaan media publikasi ilmiah internal yang terstandar mengeskalasi kerentanan aktor birokrasi untuk melakukan publikasi pada jurnal predator demi pemenuhan syarat administratif kenaikan pangkat atau perolehan angka kredit. Praktik ini secara langsung mendegradasi integritas ekosistem riset negara.⁷ Pada dimensi lain, absensi repositori bukti ilmiah yang terkendali dan terbuka memicu kerentanan struktural dalam proses pengambilan keputusan politik di daerah. Kondisi tersebut memfasilitasi pergeseran dari idealisme *Evidence-Based Policymaking* (EBPM) menuju patologi *Policy-Based Evidence Making* (PBEM), di mana instrumen riset dimanipulasi secara retrospektif semata-mata untuk melegitimasi agenda politik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memperkuat kedalaman analisis terhadap kompleksitas fenomena ini, pemetaan literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan adanya kontestasi teoretis serta polarisasi perspektif mengenai relasi antara manajemen pengetahuan dan formulasi kebijakan publik. Pada satu spektrum, kajian kontemporer oleh Laihonon, Kork, dan Sinervo (2024) menegaskan bahwa tata kelola pengetahuan pada sektor publik tidak dapat direduksi sekadar pada resolusi teknis-organisasional, seperti kompilasi dan komputasi penyimpanan data. Mereka berargumen melalui pendekatan konstruktivis bahwa pengetahuan publik harus dikonseptualisasikan sebagai proses sosial pembentukan pengetahuan (*social process of knowing*). Dalam kerangka ini, data empiris diinterpretasikan dan dinegosiasikan maknanya di tengah kompleksitas determinasi serta tekanan institusional birokrasi.⁸

Di kutub diskursus yang berbeda, literatur kritis mengenai kebijakan publik oleh Cairney dan Oliver (2020) menyoroti anomali model EBPM yang dikonseptualisasikan secara linear dan rasional-utopis. Dalam realitas politik praktis yang dikarakterisasi oleh keterbatasan kapasitas kognitif aktor (*bounded rationality*) serta ambiguitas situasional ilmuwan dan perumus kebijakan kerap beroperasi dalam hierarki pemahaman bukti yang

⁷ Jurnal predator adalah penerbitan ilmiah palsu atau menipu yang memprioritaskan keuntungan finansial di atas integritas akademik. Jurnal ini menawarkan proses publikasi yang sangat cepat dan mengenakan biaya tinggi, tetapi mengabaikan proses peninjauan sejawat (*peer review*) serta layanan editorial yang sah.

⁸ Harri Laihonon, Anna-Aurora Kork, and Lotta-Maria Sinervo, "Advancing Public Sector Knowledge Management: Towards an Understanding of Knowledge Formation in Public Administration," *Knowledge Management Research & Practice* 22, no. 3 (May 3, 2024): 223–33, <https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2187719>.

kontradiktif. Implikasinya, integrasi bukti ilmiah ke dalam kebijakan mensyaratkan adanya infrastruktur pialang pengetahuan (*knowledge brokering*) yang mampu melakukan reorientasi bingkai (*framing*) bukti agar selaras dengan siklus atensi elite politik.⁹

Lebih lanjut, analisis sistematis oleh Suazo-Galdames dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa hambatan universal dalam implementasi kebijakan berbasis bukti berakar pada kelemahan infrastruktur data, fragmentasi sistem penasihat ilmiah (*science advisory systems*), serta ketiadaan komunikasi formal yang terlembaga antara peneliti dan pengambil keputusan.¹⁰ Berkelindan dengan problem struktural tersebut, literatur spesifik oleh Xia (2021) menggarisbawahi ancaman sistemik dari industri penerbitan predator (*predatory publishing*). Fenomena ini secara sepihak memanfaatkan gerakan akses terbuka (*open access*) dengan mengorbankan kualitas validasi ilmiah. Dampak turunannya adalah penetrasi *pseudo-sains* ke dalam diskursus tata kelola negara serta inefisiensi anggaran publik yang signifikan.¹¹

Sintesis tematik terhadap berbagai diskursus keilmuan terkait menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Mayoritas kajian terdahulu cenderung beroperasi secara parsial, yang terpolarisasi antara kritik makro-politik terhadap kegagalan EBPM pada tingkat kementerian pusat, atau evaluasi teknis operasional sistem repositori pada institusi pendidikan tinggi. Konstruksi literatur kontemporer sejauh ini belum mengeksplorasi secara eksplisit peran platform jurnal elektronik berbasis *Open Journal Systems* (OJS) yang dikelola secara otonom oleh aparaturnegara di tingkat subnasional. Khususnya, dalam kapasitasnya bukan sekadar sebagai instrumen publikasi pasif, melainkan sebagai infrastruktur *boundary object* (objek tapal batas sosio-teknis) yang mengorkestrasi pembentukan pengetahuan, memitigasi intervensi patologis PBEM, sekaligus memproteksi birokrasi lokal dari penetrasi jurnal predator.

Berdasarkan celah analisis (*blind spot*) tersebut, artikel ini secara eksplisit menegaskan kontribusi teoretisnya (*novelty*). Berbeda dengan tren penelitian terdahulu yang mendominasi analisis manajemen pengetahuan pada kementerian pusat di negara

⁹ Paul Cairney and Kathryn Oliver, "How Should Academics Engage in Policymaking to Achieve Impact?," *Political Studies Review* 18, no. 2 (May 16, 2020): 228–44, <https://doi.org/10.1177/1478929918807714>.

¹⁰ Suazo-Galdames, Saracostti, and Chaple-Gil, "Scientific Evidence and Public Policy: A Systematic Review of Barriers and Enablers for Evidence-Informed Decision-Making."

¹¹ Jingfeng Xia, *Predatory Publishing* (London: Routledge, 2021), Page, 15. <https://doi.org/10.4324/9781003029335>.

maju atau kritik normatif terhadap patologi kebijakan tanpa artikulasi solusi teknokratis, penelitian ini menawarkan pendekatan baru. Fokus diarahkan pada diseminasi Jurnal Elektronik (OJS) pada level pemerintah daerah khususnya dalam kerangka kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai instrumen sosio-teknis sekaligus pialang pengetahuan (*knowledge broker*) yang krusial. Kebaruan perspektif ini terletak pada integrasi simultan antara teori manajemen pengetahuan sosial dan teori evaluasi kebijakan kritis untuk mengatasi hambatan translasi bukti riset ke dalam intervensi kebijakan lokal yang konkret.

Sebagai tesis utama (*thesis statement*) dalam bagian pendahuluan ini, diajukan argumen bahwa institusionalisasi portal jurnal elektronik yang dikelola langsung oleh instansi pemerintah daerah bukan sekadar bentuk pemenuhan target digitalisasi administratif. Sebaliknya, inisiatif ini merupakan intervensi institusional strategis untuk mendemokratisasikan pengetahuan publik, menegakkan akuntabilitas epistemik melalui proses *peer-review*, serta merestrukturisasi kultur birokrasi dari tata kelola berbasis kekuasaan tertutup menuju ekosistem inovasi terbuka yang digerakkan oleh bukti empiris (*evidence-driven open innovation*). Kajian ini memberikan implikasi penting bagi diskursus akademik dan praktisi tata kelola pemerintahan karena menawarkan purwarupa desain kelembagaan aplikatif yang dapat direplikasi untuk menjembatani kesenjangan antara produksi sains dan formulasi kebijakan. Optimalisasi sistem ini secara holistik terbukti mampu memitigasi risiko investasi riset negara dari praktik eksploitatif industri publikasi predator, memfasilitasi rekognisi global terhadap komparasi lokal, serta memastikan regulasi publik memiliki dampak yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat secara objektif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, kerangka teoretis, dan urgensi pragmatis yang telah dipaparkan, penelitian ini menganalisis tantangan struktural formulasi kebijakan berbasis bukti pada tingkat pemerintahan daerah. Alur pembahasan dikendalikan oleh tiga rumusan masalah utama:

- a. Bagaimana arsitektur *Open Journal Systems* (OJS) mentransformasi tata kelola pengetahuan birokrasi dari administrasi dokumen menjadi basis kebijakan berbasis bukti?
- b. Bagaimana tata kelola jurnal daerah berfungsi sebagai mitigasi institusional (*institutional safeguard*) terhadap praktik *Policy-Based Evidence Making*

(PBEM) dan penetrasi jurnal predator?

- c. Sejauh mana pialang pengetahuan (*knowledge brokering*) jurnal daerah mengelevasi temuan lokal ke diskursus global demi koherensi pembangunan berkelanjutan?

3. Metode Penelitian

Untuk mengonstruksikan resolusi analitis terhadap kompleksitas hambatan integrasi antara produksi pengetahuan dan formulasi kebijakan, penelitian ini mengutilisasi desain kualitatif melalui pendekatan studi kasus instrumental (*instrumental case study*) yang diintegrasikan dengan analisis kebijakan kritis (*critical policy analysis*).¹² Justifikasi pemilihan desain ini didasarkan pada premis bahwa implementasi kebijakan berbasis bukti tidak dapat direduksi sekadar pada metrik statistik komparatif. Sebaliknya, pendekatan ini memfasilitasi dekonstruksi mendalam mengenai dinamika interaksi, konfrontasi, dan negosiasi antara intervensi teknologi digital berupa sistem informasi publikasi jurnal dengan struktur hierarki birokrasi, regulasi normatif, serta patologi budaya organisasi pada tataran pemerintahan daerah. Pendekatan evaluatif ini diposisikan untuk membongkar artikulasi norma, praktik, dan relasi kekuasaan dalam siklus produksi hingga utilisasi bukti ilmiah.

Korpus data kebijakan dikurasi secara komprehensif melalui integrasi data primer yurisdiksi lokal dan data sekunder dari diskursus akademik global. Data primer bersumber dari dokumen regulatif dan teknis-otoritatif yang meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai instrumen yuridis utama; (2) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah yang mengikat fungsi kelembagaan BRIDA; serta (3) Dokumen Cetak Biru dan Proposal Pembuatan *e-Journal* BRIDA Kabupaten Jembrana (Tahun 2026) yang memuat arsitektur sistem berbasis *Open Journal Systems* (OJS), proyeksi anggaran, dan sasaran strategis manajemen pengetahuan subnasional. Data sekunder diakses secara sistematis melalui literatur kontemporer mengenai manajemen pengetahuan sektor publik, kontestasi teoretis EBPM versus PBEM, serta degradasi integritas ilmiah akibat penerbitan predator.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi (*documentary research*) dan ekstraksi kepustakaan terstruktur. Tahapan operasional ini melibatkan

¹² Jennifer Smith-Merry, "Evidence-Based Policy, Knowledge from Experience and Validity," *Evidence & Policy* 16, no. 2 (May 2020): 305–16, <https://doi.org/10.1332/174426419X15700265131524>.

kodifikasi teks regulasi, laporan perencanaan, dan literatur teoretis untuk memetakan peran aktor, alur kerja institusional, serta argumentasi normatif ekosistem inovasi daerah. Selanjutnya, analisis kebijakan dilakukan melalui sintesis antara Analisis Tematik (*Thematic Analysis*) dan Kerangka Pembentukan Pengetahuan (*Knowledge Formation Framework*). Analisis tematik diaplikasikan untuk mengidentifikasi pola kausalitas kesenjangan implementasi (*implementation gap*), seperti kontradiksi antara mandat hukum EBPM dengan keterbatasan infrastruktur lokal, serta melacak mekanisme mutasi riset objektif menjadi *Policy-Based Evidence Making* (PBEM) dalam sirkuit kekuasaan.¹³ Sementara itu, kerangka sosiologi pengetahuan publik dari Laihonon dkk. (2024) dioperasikan untuk membedah fase transisi dokumen administratif mentah menjadi pengetahuan kebijakan (*policy knowledge*) melalui ruang deliberasi editorial OJS.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Tata Kelola Riset Daerah Melalui Peralihan dari Fragmentasi Administratif Menuju *Knowledge Based Organization*

Kewajiban konstitusional negara untuk memformulasi kebijakan publik berlandaskan metodologi ilmiah mengalami reorientasi yuridis pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Melalui perspektif ilmu kebijakan publik, regulasi ini tidak diposisikan sekadar sebagai instrumen hukum administratif pengatur prosedur teknis. Sebaliknya, UU Sisnas Iptek merupakan bentuk transformasi paradigmatis dan institusional yang mengintegrasikan konsep *science-based development policy* ke dalam seluruh struktur perencanaan pembangunan sektoral.¹⁵ Pada tingkat pemerintahan subnasional (provinsi dan kabupaten/kota), operasionalisasi instrumen regulatif tersebut didelegasikan melalui Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Kebijakan ini memberikan mandat imperatif bagi pemerintah daerah untuk menginstitusikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Instansi penunjang baru ini dikonstruksikan sebagai agregator sekaligus orkestrator dalam tata kelola ekosistem inovasi daerah.¹⁶ Melalui

¹³ Holger Strassheim and Pekka Kettunen, "When Does Evidence-Based Policy Turn into Policy-Based Evidence? Configurations, Contexts and Mechanisms," *Evidence & Policy* 10, no. 2 (May 2014): 259–77, <https://doi.org/10.1332/174426514X13990433991320>.

¹⁴ Laihonon, Kork, and Sinervo, "Advancing Public Sector Knowledge Management: Towards an Understanding of Knowledge Formation in Public Administration."

¹⁵ Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi."

¹⁶ Indonesia, "Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah."

regulasi tersebut, BRIDA diwajibkan secara legal untuk memformulasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID). Dokumen kerangka kerja makro tersebut dikonstruksikan secara sistemik dan partisipatif demi memastikan bahwa seluruh intervensi kebijakan terhadap persoalan prioritas subnasional berbasis pada validitas ilmiah.

Namun demikian, determinan utama tingginya probabilitas kegagalan implementasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy Making/EBPM*) pada tataran pemerintahan daerah tidak berakar pada defisit regulasi, melainkan pada fragmentasi struktural ekosistem pengetahuan internal birokrasi. Analisis empiris terhadap lokus kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Jember mengonfirmasi anomali paradoksal yang jamak terjadi pada institusi publik di negara berkembang. Aparatur sipil daerah menunjukkan produktivitas tinggi dalam memproduksi ribuan dokumen administratif, meliputi laporan kinerja, kajian sektoral, riset pemetaan, hingga luaran proyek perubahan diklat kepemimpinan. Meskipun demikian, otoritas publik mengalami kegagalan sistemik dalam mentransformasikan dokumen tersebut menjadi aset pengetahuan strategis akibat ketiadaan instrumen kodifikasi dan wahana diseminasi yang memenuhi standar validitas epistemik. Fenomena ini merefleksikan kegagalan transisi kelembagaan menuju paradigma *knowledge-based organization* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Bank Dunia (2007). Konsekuensinya, data empiris yang diakuisisi melalui alokasi anggaran publik tersebut terdegradasi menjadi *dark data* aset informasi yang tidak terekspos. Siklus rotasi kepegawaian yang tidak diikuti dengan mekanisme *knowledge transfer* yang rigid mengakibatkan hilangnya memori institusional secara masif, yang pada akhirnya mengeliminasi kapasitas birokrasi untuk melakukan pembelajaran organisasi (*organizational learning*) secara kumulatif.¹⁷

Mengoperasikan kerangka analitis Laihonen, Kork, dan Sinervo (2024) mengenai *public sector knowledge management*, disfungsi struktural tersebut bersumber dari miskonsepsi epistemik kultur birokrasi dalam mendefinisikan manajemen pengetahuan. Otoritas publik cenderung mereduksi domain ini sekadar sebagai aktivitas kompilasi data komputasional demi mengresolusi *tame organizational problems* (permasalahan organisasional yang jinak). Padahal, pengetahuan kebijakan secara teoretis terkonstruksi

¹⁷ World Bank, *Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development*, WBI Develo (The World Bank, 2007), <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6957-9>.

melalui interaksi kompleks yang mensyaratkan interpretasi kritis dan pengujian silang (*cross-examination*) guna merespons benturan tekanan institusional.¹⁸

Oleh karena itu, inisiatif pembentukan Jurnal Elektronik (*E-Journal*) berbasis platform *Open Journal Systems* (OJS) oleh BRIDA tidak dapat diposisikan secara simplistik sebagai proyek mekanis pengadaan teknologi informasi. Secara esensial, platform ini berfungsi sebagai intervensi struktural radikal untuk mengonsolidasi fragmentasi administratif. Melalui unifikasi seluruh dokumen berbasis bukti (*evidence*) hasil kinerja birokrasi dan riset perguruan tinggi lokal ke dalam sistem kurasi OJS, pemerintah daerah secara sadar menggeser paradigma dari *closed-to-open ecosystem* (ekosistem tertutup menuju terbuka). Dalam ruang virtual ini, bukti empiris tidak sekadar diarsip secara pasif, melainkan dikodifikasi secara permanen melalui arsitektur metadata terindeks. Desain ini menjamin ketersediaan data yang siap diekstraksi sewaktu-waktu ketika siklus kebijakan (*policy cycle*) membutuhkan justifikasi saintifik yang bersifat *real-time*.

2. OJS sebagai Infrastruktur Sosio-Teknis dan Arena Pialang Pembentukan Pengetahuan

Di luar fungsi teknisnya sebagai platform publikasi artikel, implementasi *Open Journal Systems* (OJS) pada ranah pemerintahan subnasional secara teoretis dikonseptualisasikan sebagai infrastruktur *boundary object*. Konsep ini merujuk pada instrumen tapal batas sosio-teknis yang mengintegrasikan dua domain dengan orientasi rasionalitas yang distingtif: kultur analitis akademik dan pragmatisme operasional birokrasi pemerintahan. Nonaka dan Takeuchi (1996) dalam teori penciptaan pengetahuan organisasional mendalilkan bahwa artikulasi dan konversi pengetahuan tidak berlangsung secara spontan, melainkan beroperasi melalui konstruksi spiral kontinu yang diidentifikasi sebagai model SECI (*Socialization, Externalization, Combination, Internalization*).¹⁹ Dalam rutinitas operasional aparatur pemerintah daerah konvensional, kontinuitas spiral SECI tersebut cenderung mengalami fragmentasi struktural. Pengetahuan kedinasan umumnya terisolasi pada fase *socialization* (diseminasi verbal dalam forum internal tanpa dokumentasi substantif) atau terhenti pada fase *externalization* yang embrionik dalam bentuk laporan akuntabilitas formal yang

¹⁸ Laihonon, Kork, and Sinervo, "Advancing Public Sector Knowledge Management: Towards an Understanding of Knowledge Formation in Public Administration."

¹⁹ Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, "The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation," *Long Range Planning* 29, no. 4 (August 1996): 592, [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)81509-3](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3).

minim kedalaman analisis kausalitas masalah.

Melalui pelebagaan sistem OJS sebagai media publikasi kedinasan, diskontinuitas manajemen pengetahuan tersebut diintegrasikan ke dalam siklus SECI yang komprehensif dan terstruktur. Tabel 1 menguraikan mekanisme kausalitas fungsional infrastruktur OJS dalam mentransformasikan pengetahuan tak berwujud (*tacit knowledge*) aktor kebijakan menjadi instrumen bukti kebijakan (*evidence-based policy documents*) yang valid:

Tabel 1. Manifestasi Model SECI dalam Transformasi Kebijakan Publik Berbasis Bukti melalui Infrastruktur E-Journal OJS

Fase Spiral SECI (Nonaka & Takeuchi)	Implementasi Operasional Melalui Alur Tata Kelola Jurnal (OJS) di Sektor Pemerintah	Signifikansi & Implikasi Makro Terhadap Evidence-Based Policymaking (EBPM)
Socialization (<i>Tacit to Tacit</i>)	Kolaborasi dan dialog lapangan antara periset BRIDA, pejabat fungsional teknis (Penyuluh, Nakes), dan aktor akademisi dalam memetakan <i>wicked problems</i> (misal: kebuntuan irigasi desa, stunting).	Mengkalibrasi ulang kompas kebijakan. Memastikan topik riset birokrasi berakar kuat pada realitas sosiologis dan keresahan empiris <i>grassroots</i> , bukan sekadar teori gading.
Externalization (<i>Tacit to Explicit</i>)	Proses penulisan ilmiah (<i>Submission</i>) ke dalam OJS. Mengartikulasikan intuisi dan pengalaman <i>tacit</i> para ASN dalam melayani publik menjadi narasi berstandar dengan argumen empiris yang spesifik.	Menghasilkan embrio atau purwarupa dokumen kebijakan tertulis yang transparan, terstruktur logis, dan siap untuk diuji validitas metodologisnya oleh sistem pakar.
Combination (<i>Explicit to Explicit</i>)	Proses <i>Double-Blind Peer Review</i> dan <i>Editing</i> . <i>Reviewer</i> menyintesis literatur lintas sektoral (<i>state of the art</i>) untuk membenturkan klaim tulisan birokrat dengan data statistik BPS atau tren riset global.	Menghilangkan bias subyektif dari aktor aparatur. Mengamankan netralitas bukti, menyortir cacat logika, dan menjamin bahwa argumen yang ditawarkan adalah solusi tematik yang mutakhir.
Internalization (<i>Explicit to Tacit</i>)	Publikasi (<i>Publishing</i>) secara bebas akses (<i>Open Access</i>). Perumus kebijakan puncak (Bupati/Sekda) dan mesin intelijen birokrasi mengunduh	Penciptaan resiliensi birokrasi. Pembuat kebijakan menginternalisasi rasionalitas baru mengenai pola kausalitas masalah,

	artikel tersebut sebagai instrumen landasan Peraturan Daerah (Perda).	menghindari kegagalan repetitif, dan menghasilkan keputusan presisi.
--	---	--

Berdasarkan anatomi operasional pada Tabel 1, mekanisme redaksional OJS berkorelasi linier dengan konsep pembentukan pengetahuan (*knowledge formation*) menurut teori Laihonon dkk. (2024).²⁰ Melalui ruang pialang digital ini, kompleksitas tekanan institusional diurai menggunakan metodologi ilmiah. Mitra bestari (*reviewer*) yang dikonstruksikan melalui integrasi antara akademisi sebagai pakar metodologis dan kepala instansi sektoral selaku praktisi kebijakan berfungsi sebagai penapis (*gatekeeper*) dalam sistem OJS.

Proses evaluasi dioperasikan melalui demarkasi rigoros antara bukti empiris objektif dan asumsi spekulatif. Implikasinya, kewajiban administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memproduksi karya tulis ilmiah yang sebelumnya dikategorikan sebagai beban birokrasi dalam penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) telah mengalami reorientasi fungsi. Aktivitas tersebut kini bertransformasi menjadi katalisator dinamika operasional organisasi. Implementasi *e-journal* secara efektif mereduksi hambatan kompartentalisasi sektoral (*silo mentality*) antarinstansi. Melalui platform *open access*, personel lapangan di wilayah periferi yang berinteraksi langsung dengan konstituen memiliki akomodasi setara untuk mendiseminasikan solusi inovatif tanpa distorsi birokrasi vertikal. Fenomena tersebut mengaktualisasikan konsep *learning bureaucracy* (birokrasi pembelajar) dalam diskursus reformasi administrasi publik.

3. Akselerasi Resolusi Kesenjangan Bukti dan Kebijakan Melalui Konfrontasi Patologi *Policy-Based Evidence Making*

Dalam literatur kebijakan publik konvensional, Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy Making* atau EBPM) sering kali dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses yang linier, mekanis, objektif, dan rasional. Namun, narasi idealis tersebut mendapatkan kritik metodologis yang signifikan dari Cairney dan Oliver (2020). Mereka berargumen bahwa model linier EBPM merupakan sebuah simplifikasi akademis yang tidak realistis

²⁰ Laihonon, Kork, and Sinervo, "Advancing Public Sector Knowledge Management: Towards an Understanding of Knowledge Formation in Public Administration."

dan berisiko mendistorsi pemahaman operasional jika diaplikasikan tanpa telaah kritis.²¹ Ekosistem politik dan kebijakan, khususnya pada yurisdiksi negara berkembang dengan tingkat turbulensi kepentingan yang tinggi, secara empiris diwarnai oleh kontestasi kekuasaan, bias kognitif, serta keterbatasan kapasitas kognitif aktor (*bounded rationality*).²² Aktor pengambil keputusan strategis menghadapi keterbatasan temporal, alokasi sumber daya, serta objektivitas untuk mengadopsi validitas ilmiah mutlak hasil kompilasi akademis. Sebaliknya, institusi dan aktor tersebut mengutilisasi mekanisme heuristik serta simplifikasi kognitif dalam menyeleksi bukti empiris. Proses filtrasi informasi tersebut cenderung bias terhadap data yang koheren dengan orientasi ideologis, manifesto politik partisan, atau kepentingan elektoral jangka pendek.²³ Absensi infrastruktur kontrol epistemik (*epistemic checks and balances*) dalam internal birokrasi berpotensi mengeskalisasi distorsi tersebut. Tanpa adanya mekanisme kendali ini, konseptualisasi ideal *Evidence-Based Policy Making* (EBPM) berisiko mengalami degradasi fungsional dan bermutasi menjadi sebuah anomali institusional, yaitu *Policy-Based Evidence Making* (PBEM).

Policy-Based Evidence Making (PBEM) pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi struktur epistemik dalam proses teknokratis. Fenomena ini termaterialisasi ketika instansi pemerintah mengalokasikan anggaran publik (APBD) untuk membiayai riset, atau ketika otoritas birokrasi mengontrak konsultan penyusun naskah akademik dengan determinasi hasil (*predetermined output*). Melalui teknik filtrasi data selektif (*cherry-picking*), justifikasi ilmiah dikonstruksikan secara retrospektif semata-mata untuk melegitimasi intervensi kebijakan atau proyek strategis yang telah diputuskan secara sepihak oleh elite politik. Implikasinya, fungsi sains mengalami pergeseran dari instrumen pemandu kebijakan (*policy guide*) menjadi sekadar instrumen legitimasi formal (*academic rubber stamp*). Mekanisme ini secara efektif mereduksi ruang deliberasi serta mengeliminasi kritik partisipatif dari masyarakat sipil. Dalam tata kelola pemerintahan daerah yang memiliki kelemahan pada sistem pengawasan internal, praktik PBEM berkorelasi langsung dengan inefisiensi alokasi anggaran, misalokasi program sektoral, dan kegagalan sistemik yang mendegradasi kredibilitas institusional

²¹ Cairney and Oliver, "How Should Academics Engage in Policymaking to Achieve Impact?"

²² Holger Straßheim, "A World of Evidence: The Global Spread and Silent Politics of Evidence Cultures," *Policy and Society* 43, no. 4 (December 11, 2024): 414–31, <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae029>.

²³ Kathryn Oliver and Paul Cairney, "The Dos and Don'ts of Influencing Policy: A Systematic Review of Advice to Academics," *Palgrave Communications* 5, no. 1 (February 19, 2019): 21, <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0232-y>.

otonomi daerah.

Pada titik ini, distingsi kontribusi teoretis (*novelty*) dari kajian ini menjadi signifikan: Jurnal Elektronik berbasis *Open Journal Systems* (OJS) yang diinisiasi oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai instrumen mitigasi institusional (*institutional safeguard*) anti-PBEM yang presisi. Mekanisme operasionalisasinya bertumpu pada instalasi tiga pilar transparansi radikal. Pertama, adopsi kebijakan akses terbuka (*open access policy*) memaksa birokrasi untuk mendiseminasikan metodologi, desain eksperimen, teknik sampling, dan rekomendasi kebijakan secara transparan ke ruang publik. Eksposur publik ini memfasilitasi kelompok swadaya masyarakat, akademisi independen, serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) untuk melakukan pengujian forensik terhadap validitas kaidah saintifik yang melandasi narasi kebijakan. Kedua, ketersediaan jejak audit digital (*audit trail*) dalam matriks OJS mendokumentasikan setiap tahapan revisi manuskrip secara permanen. Intervensi eksternal dari otoritas birokrasi seperti manipulasi reduktif terhadap data kemiskinan atau statistik kegagalan panen secara struktural dimitigasi oleh sistem penelaahan sejawat anonim (*blind-review*) yang melibatkan pakar eksternal lintas universitas. Ketiga, delegasi wewenang pengelolaan jurnal secara mandiri kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mereposisi peran instansi tersebut. Sesuai mandat regulatif UU Sisnas Iptek, BRIDA berfungsi sebagai pialang pengetahuan (*knowledge broker*) yang otonom sekaligus pemegang otoritas validasi keilmuan, bukan sekadar instrumen administratif lokal.

Tabel 2 mengomparasikan secara sistematis divergensi fundamental antara prinsip *Evidence-Based Policy Making* (EBPM) ortodoks dan anomali PBEM, sekaligus memvisualisasikan dinamika jurnal elektronik birokrasi dalam mengintervensi patologi tersebut:

Tabel 2. Analisis Komparasi Kritis: Mekanisme Pertahanan *Evidence-Based Policymaking* vs Patologi *Policy-Based Evidence Making*

Dimensi Epistemologis & Kebijakan	Evidence-Based Policymaking (EBPM) (Ditegakkan oleh Infrastruktur E-Journal/OJS)	Policy-Based Evidence Making (PBEM)(Patologi Manipulatif Birokrasi Tanpa Penyangga OJS)
Arah & Urutan Kausalitas	Fakta Empiris Dieksplorasi → Alternatif Dievaluasi → Keputusan Regulasi Diambil.	Keputusan Politik Ditetapkan di Awal → Fakta Dipilih/Direkayasa → Pembeneran Disahkan.
Sikap Terhadap Integritas Data	Komprehensif dan Obyektif. Mencakup anomali data, mengakui kelemahan intervensi sebelumnya, serta menyertakan tinjauan <i>blind spot</i> literatur.	Manipulatif dan Reduksionis (<i>Cherry-Picking</i>). Mengamputasi data empiris yang tidak populer atau berlawanan dengan narasi resmi petinggi pemerintahan.
Mekanisme Transparansi & Validasi	Diuji secara <i>double-blind peer-review</i> dengan melibatkan pakar independen, dipublikasikan dengan lisensi <i>Open Access</i> secara global ⁴¹ .	Dihasilkan secara kompartemenisasi tertutup, dipublikasikan dalam bentuk dokumen internal (<i>grey literature</i>), dan hanya beredar antar-meja pejabat.
Resiliensi & Dampak Pembangunan	Melahirkan intervensi struktural yang presisi, efisiensi anggaran tepat sasaran, dan mengurai kompleksitas <i>wicked problems</i> secara mendasar.	Mengakibatkan ilusi pencapaian kinerja, resistensi sosial masyarakat, pemborosan masif APBD, dan menyebabkan kelumpuhan kelembagaan (<i>institutional paralysis</i>).

Institusionalisasi portal jurnal elektronik sebagai repositori bukti empiris yang valid secara struktural mengikat otoritas politik dan perumus kebijakan pada kerangka akuntabilitas ilmiah. Transformasi kultural yang diakselerasi oleh implementasi teknologi *Open Journal Systems* (OJS) ini mensyaratkan bahwa setiap formulasi regulasi publik tidak dapat lagi diundangkan tanpa melalui proses eksaminasi, melainkan harus melewati tahapan verifikasi dan dialektika empiris secara transparan di ruang publik.

4. Strategi Mitigasi Krisis Integritas Akademik Melalui Perlindungan Aparatur Sipil Negara dari Penetrasi Jaringan Jurnal Predator

Dalam lanskap disrupsi ilmiah global, salah satu hambatan eksistensial yang memitigasi transisi birokrasi menuju *evidence-informed policy* adalah ekspansi industri penerbitan predator (*predatory publishing*). Secara epistemologis, entitas tersebut merupakan operasi komersial yang memanfaatkan model bisnis akses terbuka berbayar (*author-pays open-access*) melalui eksploitasi instrumen akademik formal.²⁴ Fokus utama organisasi ini adalah akumulasi finansial melalui penarikan *Article Processing Charges* (APC) dengan mengabaikan standar integritas ilmiah. Karakteristik operasional dari mekanisme ini mencakup eliminasi proses penelaahan sejawat (*peer-review*), manipulasi komposisi dewan redaksi menggunakan identitas ilmuwan fiktif, serta diseminasi instan terhadap manuskrip yang tidak memenuhi kriteria validitas metodologis.

Dampak destruktif dari fenomena penerbitan predator terhadap ekosistem aparatur sipil negara sangat signifikan. Regulasi kepegawaian modern yang mengatur metrik profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pejabat Fungsional Tertentu seperti Analis Kebijakan, Peneliti BRIDA, Perencana Bappeda, Widyaiswara, dan fungsional pendidik mewajibkan akumulasi Angka Kredit (KUM) secara periodik. Komponen evaluasi tersebut mensyaratkan diseminasi hasil kajian lapangan ke dalam bentuk publikasi karya tulis ilmiah. Tekanan struktural dari doktrin *publish or perish*, yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur publikasi internal yang terstandar oleh institusi pemerintah, memicu kerentanan bagi aparatur negara. Akibatnya, terjadi kecenderungan publikasi naskah kebijakan strategis pada jurnal predator, baik karena orientasi praktis administratif maupun keterbatasan literasi publikasi (*academic naivety*). Otoritas penerbitan predator secara taktis mengutilisasi manipulasi rekam jejak, simplifikasi nomenklatur jurnal yang menyerupai publikasi bereputasi, serta pencantuman indeks pemeringkatan artifisial untuk mengelabui instrumen penilaian kepegawaian.

Konsekuensi linier dari anomali ini terhadap tata kelola pemerintahan daerah berdampak pada dua dimensi utama. Dari perspektif ekonomi-keuangan, alokasi anggaran publik (APBD) yang didedikasikan untuk hibah riset, insentif inovasi, dan

²⁴ Jiban Shrestha, "Predatory Journals as Threats to the Academic Publishing: A Review," *Journal of Agriculture and Natural Resources* 4, no. 2 (January 1, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.3126/janr.v4i2.33640>.

bantuan publikasi ASN tereduksi menjadi inefisiensi anggaran negara (*waste of public funds*). Sumber daya domestik yang ditujukan untuk pengembangan keilmuan nasional beralih kepada jaringan komersial luar negeri berkedok institusi akademik. Sementara itu, pada dimensi epistemik, formulasi regulasi publik seperti tata ruang, standarisasi kesehatan lingkungan, dan skema jaminan sosial yang didasarkan pada literatur tanpa kalibrasi metodologis berpotensi mendistorsi perencanaan pembangunan nasional. Penerapan desain kebijakan mitigasi risiko yang bersumber dari data yang tidak tervalidasi secara sistemik dapat mendelegitimasi tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap otoritas dan validitas negara.

Implementasi sistem *e-journal* oleh instansi orkestrator seperti BRIDA, sebagaimana diproyeksikan dalam rancangan kelembagaan di Kabupaten Jembrana, berfungsi sebagai instrumen mitigasi institusional terhadap patologi tersebut. Melalui penguasaan infrastruktur teknologi dan kode sumber terbuka (*open-source*) OJS, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menyediakan platform publikasi berskala indeksasi nasional. Jurnal ini diproyeksikan memenuhi kualifikasi akreditasi nasional (SINTA) dengan fasilitasi anggaran operasional penuh dari APBD, sehingga mengadopsi model *Diamond Open Access* tanpa beban biaya publikasi (APC) bagi penulis. Intervensi ekonomi-politik ini secara langsung memutus rantai pasokan dan permintaan (*supply-demand chain*) industri jurnal predator. Portal *e-journal* menyediakan ruang diseminasi formal yang menjamin perlindungan kekayaan intelektual atas produk birokrasi dari klaim entitas komersial eksternal. Dengan integrasi perangkat lunak deteksi plagiarisme otomatis serta adopsi komprehensif terhadap panduan etika publikasi internasional (*COPE Guidelines*), infrastruktur ini mentransformasi kerentanan birokrasi menjadi aset strategis daerah (*strategic local asset*).

5. Strategi Elevasi Pengetahuan Akar Rumpun Harmoni Interaksi Manusia dan Kecerdasan Artifisial serta Integrasi Diskursus Kebijakan Global

Pada titik kulminasi analisis, institusionalisasi jurnal elektronik pada tingkat subnasional (pemerintahan kabupaten dan provinsi) memiliki fungsi strategis serta daya ungkit struktural yang kerap diabaikan dalam formulasi kebijakan tingkat pusat. Jika dioperasikan melalui orientasi taktis, infrastruktur ini mampu mereduksi asimetri informasi antara otoritas pusat dan daerah, sekaligus mereposisi kearifan lokal (*local knowledge*) Indonesia ke dalam diskursus global. Tantangan kontemporer abad ke-21 seperti mitigasi prevalensi tengkes (*stunting*), pengentasan kemiskinan multidimensi,

perancangan resiliensi sosial terhadap bencana geologis, hingga transisi energi perdesaantidak dapat diselesaikan melalui doktrin kebijakan universal (*one-size-fits-all*).²⁵ Resolusi terhadap persoalan kompleks (*wicked problems*) tersebut mensyaratkan intervensi spesifik yang diturunkan dari konteks geokultural, demografi, dan topografi lokal (*highly context-specific*).

Namun, dalam hegemoni literatur pembangunan internasional, data empiris serta hasil eksperimentasi kebijakan dari tata kelola pemerintahan daerah kerap mengalami marginalisasi. Kondisi ini terjadi akibat kegagalan kodifikasi data ke dalam format indeks akademik primer berbahasa internasional, sehingga tidak terintegrasi dalam pangkalan data otoritatif seperti Scopus, Web of Science, maupun *Directory of Open Access Journals* (DOAJ). Eksklusi epistemik tersebut memicu kelemahan struktural dalam arsitektur kebijakan lembaga supranasional, di mana formulasi resolusi krisis global cenderung mengabaikan realitas taktis (*best practices*) serta evaluasi kegagalan implementasi kebijakan pada tingkat akar rumput (*grassroots*) di belahan bumi selatan (*Global South*).²⁶

Implementasi *e-journal* daerah yang mengadopsi standar pangkalan data metadata global melalui sistem modular OJS menjamin protokol interoperabilitas instan dengan API indeksasi eksternal serta penegasan alokasi pengenalan objek digital permanen (*Digital Object Identifier* atau DOI) yang tervalidasi secara global. Infrastruktur ini berfungsi sebagai instrumen transmisi intervensi kebijakan antarbenua. Diseminasi naskah ilmiah hasil kajian personel lapangan lokal secara akses terbuka (*open access*) ke jaringan publik seperti analisis *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob di pesisir Kabupaten Jembrana, intervensi lintas sektoral penanganan tengkes (*stunting*) di Bantaeng, atau taktik resiliensi logistik di kawasan rawan bencana menghilangkan batasan geografis informasi. Naskah tersebut dapat diakses melalui mesin pencari secara instan, ditelaah secara mendalam, disitasi dalam literatur ilmiah, dan direplikasi protokol mitigasinya oleh akademisi internasional, lembaga filantropi, maupun organisasi multilateral seperti PBB, UNDP, dan Bank Dunia untuk diintegrasikan dalam matriks komparasi kebijakan antarnegara.

²⁵ Siti Nurhuda Maisa et al., "Combating Stunting in Children Under Five Years Old: A Narrative Review of Policies and Programs in Southeast Asia," *Cureus*, December 26, 2025, <https://doi.org/10.7759/cureus.100127>.

²⁶ Julian Molina and John Connolly, "'A Modern Research Profession': Government Social Research, Evidence-Based Policymaking and Blind Spots in Contemporary Governance Research," *Contemporary Social Science* 18, no. 5 (October 20, 2023): 674–85, <https://doi.org/10.1080/21582041.2023.2221249>.

Dalam diskursus tata kelola pemerintahan berbasis teknologi modern (GovTech 4.0), konversi artefak kebijakan analog menjadi format biner jurnal elektronik mengonstruksikan fondasi bagi pergerakan *Human-AI Interaction* (HAI) pada struktur administrasi publik.²⁷ Konsolidasi parameter dataset linguistik, pencatatan variabel keberhasilan demografis, dan uraian analitis sosiologis yang distrukturkan melalui OJS menghasilkan repositori data besar pemerintah (*Data Warehouse*) berformat *machine-readable*. Gugusan data tersebut dapat didekonstruksi menggunakan algoritma kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*) dan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing* atau NLP) terpusat pada lembaga riset nasional atau badan statistik. Teknologi AI difungsikan untuk merajut model simulasi probabilistik, menyelaraskan prediksi dampak intervensi antarwilayah, menyajikan sintesis evolusi tren permasalahan sosial secara lintas waktu, serta mengoptimalkan akurasi deteksi dini pencegahan kegagalan program kerja jangka menengah sebelum alokasi anggaran terealisasi.²⁸ Pada ekosistem ini, platform jurnal elektronik bertransformasi secara holistik dari sekadar instrumen penyimpanan dokumen administratif menjadi sistem saraf otonom (*central nervous system*) yang memperkuat kelincahan organisasional sektor publik (*public sector organizational agility*) serta menegakkan fondasi pembangunan berkelanjutan berbasis ilmiah (*science-based sustainable development*) menghadapi disrupsi global.

C. KESIMPULAN

Implementasi jurnal elektronik berbasis *Open Journal Systems* (OJS) pada pemerintah daerah secara efektif mentransformasi tata kelola pengetahuan birokrasi dari pengarsipan dokumen administratif yang terfragmentasi menjadi repositori bukti empiris tervalidasi yang esensial bagi perumusan kebijakan publik. Infrastruktur sosio-teknis ini juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi institusional yang membongkar praktik manipulatif *Policy-Based Evidence Making* (PBEM) melalui kewajiban transparansi radikal dan sistem penelaahan sejawat (*peer-review*). Selain itu, penyediaan platform publikasi resmi dari institusi daerah berhasil memproteksi aparatur negara dari ancaman eksploitasi penerbitan jurnal predator yang dapat mendegradasi integritas ekosistem riset pemerintahan. Pada akhirnya, standardisasi metadata jurnal daerah ini

²⁷ Mateen A. Abbasi et al., "Human-AI Interaction Requirements in Public Sector Procurements," in *Business Information Systems*, 2026, 343–52, https://doi.org/10.1007/978-3-032-26363-6_26.

²⁸ Darmawati Darmawati et al., "The Role of Artificial Intelligence in Improving the Efficiency and Accuracy of Local Government Financial Reporting: A Systematic Literature Review," *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 11 (October 27, 2025): 601, <https://doi.org/10.3390/jrfm18110601>.

bertindak sebagai pialang pengetahuan yang mengelevasi temuan kebijakan tingkat lokal (akar rumput) ke dalam diskursus global, sehingga memperkuat koherensi pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dengan kecerdasan artifisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, Mateen A., Tommi Mikkonen, Sinna Pirinen, and Aapo Koski. "Human-AI Interaction Requirements in Public Sector Procurements." In *Business Information Systems*, 343–52, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-26363-6_26.
- Cairney, Paul, and Kathryn Oliver. "How Should Academics Engage in Policymaking to Achieve Impact?" *Political Studies Review* 18, no. 2 (May 16, 2020): 228–44. <https://doi.org/10.1177/1478929918807714>.
- Darmawati, Darmawati, Noor Ismawati Jaafar, Rahmawati HS, Haniek Khoirunnissa Baja, Asharin Juwita Purisamy, Audrey Michelle Wenny Yolanda, Baso Amir, and Muhammad Reza Pahlevi Juanda. "The Role of Artificial Intelligence in Improving the Efficiency and Accuracy of Local Government Financial Reporting: A Systematic Literature Review." *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 11 (October 27, 2025): 601. <https://doi.org/10.3390/jrfm18110601>.
- Hossin, Md Altab, Jie Du, Lei Mu, and Isaac Owusu Asante. "Big Data-Driven Public Policy Decisions: Transformation Toward Smart Governance." *Sage Open* 13, no. 4 (October 12, 2023). <https://doi.org/10.1177/21582440231215123>.
- Indonesia. "Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah," 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/267972/peraturan-brin-no-5-tahun-2023>.
- . "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no->.
- Laihonen, Harri, Anna-Aurora Kork, and Lotta-Maria Sinervo. "Advancing Public Sector Knowledge Management: Towards an Understanding of Knowledge Formation in Public Administration." *Knowledge Management Research & Practice* 22, no. 3 (May 3, 2024): 223–33. <https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2187719>.
- Maisa, Siti Nurhuda, Hasliza Abu Seman, Nurul Balquis Azlan, Syaza Lyana Idris, Nur Amalina Amirullah, and Norhasmah Sulaiman. "Combating Stunting in Children Under Five Years Old: A Narrative Review of Policies and Programs in Southeast Asia." *Cureus*, December 26, 2025. <https://doi.org/10.7759/cureus.100127>.
- Molina, Julian, and John Connolly. "'A Modern Research Profession': Government Social Research, Evidence-Based Policymaking and Blind Spots in Contemporary Governance Research." *Contemporary Social Science* 18, no. 5 (October 20, 2023): 674–85. <https://doi.org/10.1080/21582041.2023.2221249>.
- Nonaka, Ikujiro, and Hirotaka Takeuchi. "The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation." *Long Range Planning* 29, no. 4 (August 1996): 592. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)81509-3](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3).
- Oliver, Kathryn, and Paul Cairney. "The Dos and Don'ts of Influencing Policy: A Systematic

- Review of Advice to Academics." *Palgrave Communications* 5, no. 1 (February 19, 2019): 21. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0232-y>.
- Raghavan, Aarthi, Serik Orazgaliyev, and Mehmet Akif Demircioglu. "Public Sector Innovation and Wicked Problems in Asia: From Reactive to Proactive Governance." *International Journal of Innovation Studies*, December 2025, 100172. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2025.12.003>.
- Schneider, Mike D, Helena Slanickova, Hannah Rubin, Remco Heesen, Anne Schwenkenbecher, Alejandro Bortolus, Emelda E Chukwu, et al. "Revisiting the Base in Evidence-Based Policy." *Political Studies* 74, no. 1 (February 12, 2026): 210–28. <https://doi.org/10.1177/00323217251320728>.
- Shrestha, Jiban. "Predatory Journals as Threats to the Academic Publishing: A Review." *Journal of Agriculture and Natural Resources* 4, no. 2 (January 1, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.3126/janr.v4i2.33640>.
- Smith-Merry, Jennifer. "Evidence-Based Policy, Knowledge from Experience and Validity." *Evidence & Policy* 16, no. 2 (May 2020): 305–16. <https://doi.org/10.1332/174426419X15700265131524>.
- Straßheim, Holger. "A World of Evidence: The Global Spread and Silent Politics of Evidence Cultures." *Policy and Society* 43, no. 4 (December 11, 2024): 414–31. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae029>.
- Strassheim, Holger, and Pekka Kettunen. "When Does Evidence-Based Policy Turn into Policy-Based Evidence? Configurations, Contexts and Mechanisms." *Evidence & Policy* 10, no. 2 (May 2014): 259–77. <https://doi.org/10.1332/174426514X13990433991320>.
- Suazo-Galdames, Iván Claudio, Mahia Saracostti, and Alain Manuel Chaple-Gil. "Scientific Evidence and Public Policy: A Systematic Review of Barriers and Enablers for Evidence-Informed Decision-Making." *Frontiers in Communication* 10 (July 30, 2025). <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305>.
- World Bank. *Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development*. WBI Develo. The World Bank, 2007. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6957-9>.
- Xia, Jingfeng. *Predatory Publishing*. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003029335>.